



Tantangan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Dalam Menjalankan Pendidikan Inklusi di Tingkat Sekolah Dasar

Melati Ansa Purri ¹, Andini ², Ulfa Zahra Tunnur ³, Opi Andriani ⁴

¹⁻⁴ Universitas Muhammadiyah Muara Bungo

Email: melatiacer6@gmail.com, aandhini63@gmail.com, ulfazahra355@gmail.com, opi.adr@gmail.com

Abstract. *Students with special needs who study in general elementary schools often face difficulties in the learning process. Many things become obstacles in the implementation of inclusive education. This study aims to analyze the implementation of inclusive education for children with special needs in elementary schools. The research method or approach in this study uses a library research approach. Techniques for collecting data and information through literature review. The results of the study stated that formal elementary schools provide inclusive education for Children with Special Needs (ABK). However, when viewed from the level of readiness, it is still not optimal because there is still a lack of adequate educators related to their educational background so that in conducting guidance to children with special needs, they still encounter many challenges and obstacles. Based on an analysis of several related research journals, it can be said that in fact the special assistant teachers for ABK with an undergraduate background in the Special Education Study Program are still relatively few. In the end, most schools that run inclusive education implement the obligation of mentoring training for students with Special Needs (ABK).*

Keywords: *Education, inclusion, children with special needs, elementary schools, teachers.*

Abstrak. Peserta didik dengan kebutuhan khusus yang menempuh pendidikan di sekolah dasar umum seringkali menghadapi kesulitan dalam menempuh proses pembelajaran. Banyak hal yang menjadi kendala dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pelaksanaan pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar. Metode penelitian atau pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan atau library research. Teknik pengumpulan data dan informasi melalui kajian literatur. Hasil dari kajian tersebut menyebutkan bahwa sekolah dasar formal sudah menyediakan pendidikan inklusi untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Akan tetapi, apabila dilihat dari tingkat kesiapannya masih belum maksimal karena masih kurangnya tenaga pendidik yang memadai terkait latar belakang pendidikannya sehingga dalam melakukan bimbingan kepada anak berkebutuhan khusus masih menemukan banyak tantangan dan hambatan. Berdasarkan analisis pada beberapa jurnal penelitian terkait pun dapat dikatakan bahwa ternyata guru pendamping khusus ABK dengan latar belakang S1 Program studi Pendidikan Luar Biasa masih tergolong sedikit. Pada akhirnya, sebagian besar sekolah yang menjalankan pendidikan inklusi menerapkan kewajiban pelatihan pendampingan bagi siswa Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) tersebut.

Kata kunci: Pendidikan, inklusi, anak berkebutuhan khusus, sekolah dasar, guru

LATAR BELAKANG

Seiring berjalannya waktu, perhatian yang diberikan oleh masyarakat internasional terhadap para penyandang disabilitas semakin meningkat dan mereka menunjukkan antusiasme melalui berbagai aspek terkait hak asasi manusia pada penyandang disabilitas (Rioux & Carbert, 2003). Hal tersebut pun merujuk kepada pergeseran paradigma mengenai penyandang disabilitas. Adanya peralihan dalam pemberian layanan penyandang disabilitas diawali dengan model pelayanan tradisional yakni secara sukarela, yang melalui beberapa proses transisi sehingga mencapai model pelayanan inklusif dengan *inclusive development – inclusive society*

(Santoso & Apsari, 2017). Model inklusif ini terbentuk demi mencapai kesetaraan hidup para penyandang disabilitas dalam setiap segi kehidupan, salah satunya dalam menempuh pendidikan. Melalui pendidikan, manusia dapat memperoleh bekal berupa ilmu yang berguna dalam menghadapi era globalisasi—sebagai wadah perkembangan IPTEK. Mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1), setiap orang berhak menerima pendidikan terlepas dari apapun keragaman yang ada pada diri individu. Walaupun demikian, sebagian warga negara belum mendapatkan pendidikan secara layak yang disebabkan oleh berbagai alasan, salah satunya yakni akibat keterbatasan fisik dan mental— seperti yang dihadapi oleh orang-orang dengan berkebutuhan khusus. Pemerintah mengupayakan persoalan ini dengan mengeluarkan kebijakan UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dalam pasal 5 ayat 1, 2, dan 4 yang mengemukakan bahwa segenap warga negar menyandang hak yang setara dalam memperoleh pendidikan berkualitas. Kebijakan tersebut pun berlaku pada WNI dengan kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan sosial, serta mereka yang memiliki potensi kecerdasan serta bakat istimewa. Gambaran pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus diatur melalui UndangUndang No. 70 tahun 2009 pasal 1 yang menyatakan bahwa —Pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersamasama dengan peserta didik pada umumnya. Hal tersebut membuahkan wujud keadilan akan hak berpendidikan WNI berkebutuhan khusus sekalian. Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Indonesia kian meningkat setiap tahunnya. PBB memberikan estimasi bahwa setidaknya terdapat 10 persen anak usia sekolah merupakan penyandang disabilitas. Menurut data yang dihimpun dari Direktorat Sekolah Dasar Kemendikbudristek memperlihatkan kuantitas Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif (SPPPI) menyentuh angka 17.134 pada jenjang SD.

Satuan pendidikan tersebut mencakup sekitar 57.155 siswa berkebutuhan khusus. Selain itu, terdapat juga sebaran SPPPI jenjang Sekolah Dasar yakni ada di 511 Kabupaten/Kota. Berdasarkan kajian yang dilakukan, analisis mengenai pendidikan inklusi masih cenderung sedikit apabila dibandingkan dengan jumlah ABK di Indonesia—sehingga dirasa belum cukup untuk menjadi barometer efektivitas dan efisiensi penerapan pendidikan inklusi. Pengaplikasian pendidikan inklusi menekankan bahwa seluruh siswa dapat diterima tanpa diskriminasi, sehingga menciptakan bentuk pelayanan kesetaraan pendidikan. Pendidikan inklusi memaksimalkan seluruh potensi serta keterampilan pelajarnya secara intens, agar mereka dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial sekitarnya. Seperti yang

telah diketahui bahwa anak dengan kebutuhan khusus yang masuk pada ruang sumber inklusif itu telah memiliki jadwal agar selama proses pembelajaran dapat lebih teratur serta pada saat istirahat mereka dapat kembali ke kelas reguler untuk bermain bersama temanteman di kelasnya. Hal tersebut ditujukan untuk melatih anak dengan kebutuhan khusus agar dapat bersosialisasi dengan orang lain. Dengan bersosialisasi, membiasakan anak untuk berempati dengan temannya serta dapat mengenali dan mengelola emosinya. Anak dengan kebutuhan khusus sering terlihat berbeda baik dari fisik, mental, maupun social emosional. Mereka mempunyai karakteristik khusus yang dapat mengakibatkan adanya beberapa penyesuaian pada bidang tertentu, agar mereka tetap mendapatkan hak yang sama dengan anak lain dan bahkan penyesuaian tersebut harus dapat mengoptimalkan perkembangannya sebagaimana layaknya anak- anak yang lain (Geniofam, 2010).

Penyesuaian yang dimaksud adalah penyesuaian lingkungan yang dapat mendukung kebutuhan semua anak, penyesuaian dari kemampuan, keterampilan dan pengetahuan pendidik. Akan tetapi, masih banyak anak berkebutuhan khusus mengalami diskriminasi dari lingkungan sekitar. Menurut Smith (2015) salah satu cara efektif untuk mengatasi diskriminasi, membangun suatu masyarakat inklusif, menciptakan komunitas ramah, dan mencapai pendidikan untuk semua adalah dengan mengadakan sekolah reguler yang berorientasi pendidikan inklusif. Sekolah juga memerlukan perhatian untuk dapat memodifikasi dan menyesuaikan anak berkebutuhan khusus tersebut, sehingga pendidikan inklusi dapat relevan dengan kebijakan pada umumnya, seperti dapat memasukkan serta mendidik semua peserta didik dengan ramah dan fleksibel sehingga peserta didik dapat berpartisipasi dengan baik dalam proses pembelajaran. Dalam pelaksanaannya, pendidikan inklusif memiliki prinsip dasar yang mengatakan bahwa semua orang setara dan harus saling menghargai (Martona, 2013). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, pasal 4 tentang standar nasional pendidikan yang memiliki tujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk karakter atau watak, dan peradaban bangsa yang bermanfaat.

Selain itu, dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 70 Tahun 2009, pasal 6 yang menyatakan bahwa pemerintah kabupaten atau kota menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan siswa, pemerintah kabupaten atau kota menjamin tersedianya sumber daya pendidikan inklusif pada satuan pendidikan inklusif, dan pemerintah serta pemerintah provinsi membantu tersedianya sumber daya dalam pendidikan inklusif. Pada pelaksanaannya, pendidikan inklusif merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi

untuk membangun tatanan masyarakat yang inklusif. Sistem penyelenggara dalam pendidikan inklusif adalah dengan memberikan kesempatan kepada seluruh peserta didik dari berbagai latar belakang pendidikan dan pembelajaran yang berbeda-beda agar mereka dapat belajar dalam satu lingkungan secara bersama-sama. Selain itu, layanan pendidikan pada sekolah inklusi disesuaikan dengan kebutuhan dana dan kemampuan siswanya.

Penerapan dalam pendidikan inklusif tentunya tidak semudah yang dibayangkan karena dibutuhkan beberapa persiapan yang mendalam agar pelaksanaan pendidikan inklusif sesuai dengan yang dipahami secara teoritis. Terdapat beberapa persiapan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pendidikan inklusif, antara lain (1) Kesiapan pengajar dalam memiliki kompetensi, yakni seperti dengan adanya pemahaman serta keterampilan mengajar dalam mengelola kelas inklusif; (2) Kurikulum yang terdiferensiasi sesuai dengan kapasitas serta kebutuhan dari siswa berkebutuhan khusus; (3) Kesadaran, pemahaman, dan penerimaan teman sebaya dan orang tuanya tentang kehadiran siswa dengan kebutuhan khusus di sekolah; dan (4) Ketersediaan fasilitas untuk mendukung proses belajar mengajar bagi siswa berkebutuhan khusus. Pelaksanaan pembelajaran bagi anak yang memiliki kebutuhan khusus sangat membutuhkan strategi. Terdapat teknik tersendiri yang akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak. Pembelajaran bagi anak yang memiliki kebutuhan khusus perlu dipersiapkan oleh pengajar di sekolah dengan melihat kondisinya sehingga mereka dapat berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Pembelajaran tersebut disusun berdasarkan penggalan kemampuan diri anak yang memiliki kebutuhan khusus yang didasarkan pada kurikulum berbasis kompetensi. Peran seorang pendidik atau pengajar dalam pendidikan inklusif ini adalah untuk mengarahkan peserta didik sesuai dengan potensi serta bakat yang dimiliki oleh setiap siswa. Seorang guru atau pengajar merupakan orang yang terdekat bagi siswa. Selain itu, guru juga dapat menjadi kedua orang tua peserta didik selama di sekolah. Seorang pengajar dalam pelaksanaan pembelajaran inklusi lebih menekankan pada kemampuannya dalam mengelola kelas saat proses pembelajaran berlangsung. Maka dari itu, guru atau pengajar harus memiliki kompetensi dalam mengelola pembelajaran, pemahaman terhadap siswa yang memiliki beragam perbedaan, dan pelaksanaan proses pembelajaran yang bersifat mendidik. Dalam pelaksanaan pendidikan inklusif juga terdapat beberapa komponen yang harus dipenuhi, antara lain peserta didik atau siswa, kurikulum, dan sarana prasarana. Selain itu, dalam proses penerimaan siswa, perlu diperhatikan masalah identifikasi untuk memperoleh siswa yang mengalami keterbatasan atau gangguan, baik dari fisik, intelektual, sosial, perilaku, maupun emosional. Proses identifikasi dilakukan dengan beberapa tujuan, yakni penjangkaran

kemungkinan siswa mengalami masalah belajar, pengalihan tangan atau referal, klasifikasi yang memiliki keterkaitan dengan pengelompokan jenis keterbatasan atau gangguan yang dialami siswa, perencanaan pembelajaran yang terkait dengan pembuatan program pembelajaran secara individual sesuai dengan gangguan yang dialami siswa, dan monitoring kemajuan belajar yang memiliki keterkaitan dengan evaluasi program yang sudah dilaksanakan. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang sudah diperoleh berdasarkan kajian pustaka. Pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Heni Mularsih (2019), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran dari pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah dasar negeri di Jakarta.

Hasil penelitian menyatakan bahwa secara umum Sekolah dasar Negeri Inklusi di Jakarta Barat masih belum memenuhi persyaratan penyelenggaraan sekolah inklusi sesuai dengan Undang-Undang tentang Sekolah Inklusi, terutama berkaitan dengan belum dilakukannya identifikasi bagi peserta didik ABK, belum tersedianya guru pendamping khusus, serta belum terpenuhinya sarana dan prasarana yang memadai (Heni Mularsih, 2023). Berikutnya, penelitian yang dilakukan oleh andini dan ulfa Zahra tunnur (2023) dengan tujuan untuk menganalisis penyelenggaraan pendidikan inklusi bagi anak dengan kebutuhan khusus serta meninjau manajemen pengadaan dan pembinaan tenaga kependidikan di sekolah dasar. Hasil yang diperoleh dari penelitian menyatakan bahwa terdapat sekolah dasar negeri atau swasta sudah terlanjur menerima anak berkebutuhan khusus, belum ada kesiapan untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi atau belum adanya program pendidikan individual untuk anak berkebutuhan khusus, seperti tersedianya guru pendamping khusus maupun pembinaan bagi guru-guru untuk mendapatkan pelatihan dalam menangani anak berkebutuhan khusus serta fasilitas dan sarana yang lebih lengkap di sekolah, khususnya untuk media-media pembelajaran. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh melati ania putri dkk. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pelaksanaan program pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) di SDN 032/II Muara Bungo. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan program pendidikan inklusi di SDN 032/II Muara Bungo. menggunakan kurikulum 2013. Akan tetapi, bagi siswa berkebutuhan khusus yang tidak dapat mengikuti materi di kelas reguler, tutor khusus melakukan modifikasi kurikulum sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan siswa yang memiliki kebutuhan khusus yang disebut kurikulum PPI (Individual Learning Program). Pelaksanaan pembelajaran inklusi di SDN 032/II Muara Bungo dilakukan dengan model kelas reguler. Dalam hal ini siswa yang memiliki kebutuhan khusus belajar bersama-sama dengan siswa reguler lainnya tetapi dalam waktu-waktu tertentu

siswa dengan kebutuhan khusus dapat ditarik ke dalam ruang sumber inklusi oleh tutor khusus. Hal ini dilakukan karena dilihat dari kondisi dari siswa berkebutuhan khusus yang masih belum dapat sepenuhnya menyesuaikan diri dengan kemampuan teman sebayanya di kelas reguler.

METODE PENELITIAN

Pada artikel ini, kami menerapkan kajian literatur atau studi kepustakaan sebagai metode penulisan. Studi kepustakaan sendiri merupakan serangkaian aktivitas yang terkait dengan metode penghimpunan data pustaka, membaca, menuliskan serta mengelola materi penelitian (Zed, 2008:3). Studi kepustakaan dilaksanakan oleh segenap peneliti guna mempermudah dirinya memperkuat fondasi dalam memperoleh serta mengembangkan landasan teori, kerangka berpikir, dan menentukan hipotesis. Kami mengawali proses pembuatan artikel ini dengan melakukan diskusi mengenai topik seperti apa yang perlu diperluas pembahasannya. Kami menerapkan teknik pengumpulan data dengan memilah 25 sumber informasi berupa jurnal dan/atau artikel yang relevan dengan judul diatas. Kami menganalisis eleme abstrak dari setiap referensi, lalu mengevaluas apakah permasalahan yang dibahas relevan dengan nilai- nilai serta tujuan yang ingin dicapai. Diketahui pula bahwa subjek penelitian diantaranya ialah pemangku kepentingan pendidikan, siswa inklusi, dan orang tua. Sedangkan data yang akan dicakup menyangkut teknis pembelajaran, manajemen kegiatan belajar mengajar (KBM), kompetensi siswa, penindakan masalah belajar bagi ABK, dan lain-lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pendidikan Inklusi

Inklusi bersumber dari kata—*inclusion*ll, yang berarti melibatkan atau mengajak. Pengertian inklusi disusun demi merealisasikan lingkungan yang ramah untuk semua orang dengan mengajak dan mengikutsertakan orang dari berbagai keanekaragaman kemampuan, status, kondisi, latar belakang, etnik, budaya dan lainnya. Menurut Garnida (2015: 48) pendidikan inklusif merupakan system penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan tertentu dan anakanak lainnya yang disatukan tanpa pertimbangan akan keterbatasan masingmasing. Pendidikan inklusi merupakan wadah pembelajaran publik dimana pelajar berkebutuhan khusus dan pelajar tanpa disabilitas belajar secara bersamaan. Wujud pendidikan inklusif merujuk kepada kebutuhan seluruh anak dalam

mendapatkan pendidikan, tanpa ada diskriminasi fisik maupun psikis anak (Tarmansyah, 2013). Hildegun Olsen (2007:82) mengungkapkan bahwa dalam implementasi pendidikan inklusi, setiap sekolah wajib mengakomodasi setiap anak terlepas dari bagaimana kondisi fisik, intelektual, social emosional, linguistik atau kondisi lainnya. Staub dan Peck (Effendi, 2013) mengatakan pula bahwa pendidikan inklusi merupakan penempatan anak berkelainan ringan, sedang, dan berat secara penuh di kelas reguler. Hal ini menunjukkan bahwa kelas reguler merupakan tempat belajar yang relevan serta terbuka bagi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Sedangkan menurut Illahi (2013: 24) mengatakan bahwa pendidikan inklusif memiliki pengertian sebagai sebuah konsep yang menampung semua anak yang memiliki kebutuhan khusus ataupun anak yang memiliki kesulitan membaca dan menulis. Semua anak tanpa terkecuali dapat dengan mudah memperoleh pendidikan yang sesuai. Selain itu, Illahi juga berfokus pada anak yang mengidap kesulitan membaca dan menulis dengan tujuan agar para penyandang yang kesulitan membaca dan menulis mampu mengatasi kelemahannya serta dapat bermasyarakat dengan baik. Pendidikan inklusi di Indonesia memiliki pengertian sebagai suatu sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler.

Berdasarkan dari beberapa pendapat, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusi merupakan konsep pelayanan pendidikan terpadu bagi setiap anak yang bertujuan untuk memperoleh pendidikan yang layak, khususnya bagi anak yang memiliki kebutuhan khusus yang diselenggarakan di sekolah reguler atau formal. Selain itu, kurikulum dalam pendidikan inklusif harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, baik siswa reguler maupun siswa yang memiliki kebutuhan khusus. Hal ini dilakukan dengan tujuan supaya tidak terjadi ketimpangan dalam proses pembelajaran. Selain itu, hal ini juga menguntungkan proses belajar mengajar, baik dilihat dari sisi pengajar maupun dari sisi siswa yang memiliki kebutuhan khusus. Pendidikan menjadi salah satu hak pada segenap masyarakat tanpa terkecuali, begitu pula untuk ABK. Berdasarkan Permendiknas nomor 70 pasal 2 tahun 2009, tujuan pendirian pendidikan inklusi yakni untuk:

- 1) Membuka kesempatan yang selengkap mungkin terhadap murid dengan kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, mempunyai potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa demi mencapai pendidikan yang berkualitas yang sinkron bersama bakat dan kemampuannya.
- 2) Memanifestasikan pengelolaan keberlangsungan pendidikan yang menjunjung

tinggi keanekaragaman, serta non-diskriminatif kepada seluruh pelajar sebagaimana yang telah dipaparkan pada poin sebelumnya.

2. Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar

Pada pelaksanaannya proses penerimaan siswanya tidak jauh berbeda dengan penerimaan siswa reguler. Namun, anak yang memiliki kebutuhan khusus perlu ditinjau kemampuannya dalam hal kognitif, emosi, sosial, dan perilakunya — sehingga dirasa masih terdapat sedikit diskriminasi dalam proses penerimaannya. Peninjauan tersebut dapat memperlihatkan bahwa klasifikasi kelas belajar ABK terbilang masih umum dan belum memperhatikan detail dari setiap jenis disabilitas para ABK. Selain itu, hal yang menjadi tantangan para penyelenggara pendidikan inklusi sekaligus ABK ialah penyesuaian kurikulum yang fleksibel untuk anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus atau keterbatasan mental di kelas reguler. Pada proses pelaksanaan pembelajaran pendidikan inklusi, seorang guru harus mampu menciptakan suasana belajar yang ramah serta nyaman serta memungkinkan semua siswa dapat belajar dengan nyaman dan senang. Berdasarkan hasil penelitian beberapa jurnal, terdapat sebuah fakta bahwa sekolah formal yang menerima anak yang memiliki kebutuhan khusus belum dapat melaksanakan pendidikan inklusi sesuai dengan pedoman penyelenggaraan. Seperti yang telah diketahui bahwa pelaksanaan pendidikan inklusi tidak mudah, ditambah perilaku para ABK yang sulit untuk diprediksi. Sejauh ini, sekolah formal yang menerima anak berkebutuhan khusus belum memiliki kriteria khusus terhadap anak-anak tersebut, seperti karakteristik atau jenis disabilitasnya, jumlah peserta didik ABK yang akan diterima, tes tingkat kecerdasannya, serta sarana dan prasarannya masih belum menunjang sepenuhnya untuk anak-anak tersebut di sekolah formal. Misalnya, guru yang mengajar ABK belum memiliki kemampuan yang memadai, seperti pemahaman dan pengalaman untuk membimbing ABK karena proses pembelajaran anak tersebut tentunya berbeda dengan anak pada umumnya. Ketidakmampuan guru dalam menangani hal tersebut karena kurangnya sarana dan fasilitas, serta latar belakang pendidikan guru yang sebenarnya bukan untuk menangani ABK. Pelayanan yang perlu dicakup dalam kegiatan belajar mengajar pada Sekolah Dasar Inklus ialah pemberian motivasi dan validasi pada murid akan penerimaan tentang keadaan yang dialami—berdasar pada nilai serta norma yang melekat di masyarakat Indonesia, seperti dengan menyisipkan pendidikan pancasila secara sederhana dalam melakukan kegiatan berinteraksi sehari-hari. Selain itu, pelayanan yang mendasar pula seperti pengklasifikasian Anak Berkebutuhan Khusus berdasarkan kebutuhannya masing-masing, terlepas dari apapun jenis disabilitas yang anak tersebut alami, perlu diterapkan. Menurut

Vaughn, Bos & Schumn, dipetik oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa (2008: 6-10), penempatan ABK pada sekolah inklusi di Indonesia terbagi menjadi 6 (enam) pendekatan, yaitu:

- 1) Kelas umum - Full Inclusion, ABK dengan pelajar normal menjalani KBM dengan waktu dan model pembelajaran yang sama seperti sekolah umum
- 2) Kelas umum - Cluster, ABK dengan pelajar normal menjalani KBM di kelas umum dalam grup khusus
- 3) Kelas umum - Pull-out, ABK dengan pelajar normal menjalani KBM di kelas umum, dan pada saat-saat tertentu meninggalkan ruangan kelas untuk melakukan bimbingan bersama instruktur khusus
- 4) Kelas umum - Cluster & Pull-out, ABK dengan pelajar normal menjalani KBM di kelas umum dalam grup khusus, namun pada saat tertentu dialihkan menuju ruang sumber untuk belajar dan mendapat layanan bimbingan dari guru pembimbing khusus;
- 5) Kelas spesifik berintegrasi, hanya berisikan siswa berkebutuhan khusus dan melaksanakan KBM serta menerima layanan bimbingan dari instruktur khusus di dalam kelas khusus pula pada sekolah umum. Namun pada aktivitas tertentu dapat belajar bersama siswa lain di kelas umum.
- 6) Kelas full private, berisikan siswa berkebutuhan khusus yang melaksanakan KBM dan menerima layanan bimbingan dari guru pembimbing khusus di dalam kelas khusus yang ada pada sekolah umum. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran pendidikan inklusi di sekolah dasar, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, yakni harus mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran. Selain itu, juga harus dapat menyesuaikan dengan kebutuhan belajar dari semua siswa atau peserta didik. Untuk siswa yang mengikuti kurikulum yang telah dikembangkan sesuai dengan standar nasional siswa tersebut wajib mengikuti ujian nasional. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pendidikan inklusi, antara lain:
 - a) Sekolah yang memiliki pendidikan inklusi harus mampu menjadikan serta mengelola kelas menjadi kelas yang hangat, mampu untuk menerima berbagai kekurangan, keanekaragaman, dan mampu untuk menghargai berbagai perbedaan. Hal ini dapat diwujudkan dengan menerapkan kurikulum pembelajaran yang bersifat interaktif.

- b) Merencanakan, pelaksanaan, dan evaluasi.
- c) Pendidik atau pengajar harus mampu bekerja sama dengan orang tua dalam proses pendidikan
- d) Kepala sekolah dan pengajar harus mendapatkan pelatihan tentang cara mengajar dalam pendidikan inklusi
- e) Guru pembimbing khusus harus mendapatkan pelatihan khusus
- f) Penilaian dilakukan oleh pihak sekolah yang memiliki tujuan untuk memahami anak yang memiliki kebutuhan khusus dengan disepakati oleh orang tua.
- g) Mengenali hambatan-hambatan mengenai kelainan fisik, sosial, dan masalah lainnya terhadap pembelajaran ABK.
- h) Dalam sekolah inklusi harus mengikutsertakan masyarakat untuk melaksanakan perencanaan, dan monitoring mutu pendidikan untuk semua peserta didik. Masih diperlukannya dari pemerintah setempat. Pemerintah dapat menempatkan guru pembimbing khusus yang mempunyai keahlian di bidangnya. Kemudian, dapat melengkapi fasilitas yang di sekolah formal, untuk media pembelajaran dengan tujuan dapat memudahkan guru sehingga tidak susah lagi untuk mencari media pembelajaran untuk siswa dengan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) tersebut. Mengingat juga bahwa semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk dapat bersekolah di sekolah formal. Menurut Soetjipto (2009:66), terdapat tugas dari guru pendamping, yaitu:
 - i. Memberikan bantuan berupa layanan khusus bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas umum, seperti remedial, memberikan tugas yang lebih ringan kepada anak yang memiliki kebutuhan khusus tersebut.
 - ii. Memberikan bimbingan dan membuat catatan khusus jika terjadi pergantian guru mata pelajaran.
 - iii. Memberikan bantuan pada guru kelas atau guru mata pelajaran terkait supaya mereka dapat memberikan pelayanan khusus.
 - iv. Melaksanakan asesmen bersama team untuk mendiagnosa permasalahan belajar ABK.
 - v. Membuat silabus, kurikulum dan evaluasi yang disesuaikan dengan kemampuan anak. Sekolah formal mengadakan pendidikan inklusi karena

adanya penunjukan dari dinas di wilayah setempat. Selain itu, masih kurang adanya kesadaran orangtua. Adanya anak-anak di sekitar lingkungan sekolah yang masuk kedalam kategori Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), tetapi orang tuanya belum memiliki kesadaran untuk menyekolahkan anaknya tersebut di SLB. Hal tersebut juga disebabkan salah satunya karena faktor ekonomi keluarga yang berkeberatan untuk menyekolahkan anaknya di sekolah khusus. Hasil temuan ini sesuai dengan Permendiknas No. 70 Tahun 2009 pasal 4 ayat 1 yang berbunyi —pemerintah. kabupaten/kota menunjuk minimal satu sekolah dasar dan satu sekolah menengah pertama pada setiap kecamatan dan satu satuan pendidikan menengah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi yang wajib menerima peserta didik dengan kebutuhan khusus.

Dari hasil penelitian berbagai jurnal, sekolah mendapatkan apresiasi khususnya dari orang tua anak tersebut. Pada saat proses penerimaan peserta didik baru, sekolah melakukan pengamatan terhadap calon siswa dengan menyesuaikan jenis kebutuhan atau kelainan, yaitu kategori ringan serta berdasar domisili tempat tinggal anak yang dekat dengan lingkungan sekolah. Berdasarkan pasal 8 Pembelajaran pada Pendidikan Inklusi, mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik tersebut.

3. Tantangan Anak Berkebutuhan Khusus

Dalam Menjalani Pendidikan Inklusi

- 1) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Menjalani Pendidikan Inklusif Terdapat dua faktor terkait aktivitas ABK dalam menjalani pendidikan inklusinya, yakni faktor pendukung dan penghambat. Faktor tersebut merupakan indikator pembantu proses asesmen terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusi. Hal tersebut pun berpotensi menjadi batu loncatan atau pertimbangan pada proses perkembangan kebijakan pada kurikulum pendidikan inklusif di masa yang akan datang.
 - a. Faktor Pendorong

Adanya ketentuan tertulis dari pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 Pasal 4 ayat 1 akan standar nasional pendidikan yang hendaklah dilaksanakan oleh para pemangku pendidikan inklusi— yakni

berbunyi mendorong keterwujudan sistem pendidikan inklusif, yakni setiap satuan pendidikan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan pembelajaran bagi siswa dengan kebutuhan khusus. Tertera pula pada pasal 6 yang menyatakan bahwa adanya jaminan keberlangsungan pendidikan inklusif berdasarkan kebutuhan siswa oleh pemerintah daerah.

b. Faktor Penghambat

- a) Keterbatasan sarana prasarana Dalam pelaksanaan pendidikan inklusi tentunya membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai karena pendidikan inklusi harus mampu memberikan fasilitas sesuai dengan semua kebutuhan anak yang memiliki kebutuhan khusus. Seperti kelas untuk bimbingan khusus, alat bantu pendengaran untuk tuna rungu, buku braille, jalan khusus untuk anak tuna daksa, dan sebagainya. Sarana dan prasarana yang terbatas dalam sekolah inklusi akan memiliki dampak yang cukup besar, yakni akan berdampak pada kurangnya pelayanan yang diberikan sekolah bagi anak berkebutuhan khusus. Masalah utama dari keterbatasan sarana dan prasarana adalah dari factor biaya.
- b) Rendahnya kesadaran orang tua dan masyarakat Anak yang memiliki kebutuhan khusus sangat memerlukan peran yang cukup besar dari orang tua, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam bentuk dukungan kepada anak. Dalam hal ini dukungan orang tua memiliki peran penting. Dukungan orang tua memiliki berbagai bentuk, seperti keterlibatan orang tua dalam mengasuh di rumah, menciptakan situasi yang nyaman, dan melakukan pola pengasuhan yang tepat. Seorang anak yang memiliki kebutuhan khusus dapat mencapai potensi secara maksimal apabila anak tersebut mendapatkan dukungan penuh dari orang tuanya. Selain itu, masyarakat juga merupakan tokoh penting yang dapat mempengaruhi perkembangan anak yang memiliki kebutuhan khusus. Penerimaan dari orang tua serta masyarakat terhadap kondisi anak akan mempengaruhi sikap mereka kepada anak. Lingkungan yang mampu menerima kondisi kekurangan anaknya, akan berusaha mencari jalan untuk mengurangi pengaruh dari kekurangan tersebut dan mendorong pembelajaran anak dengan maksimal. Namun, nyatanya masih banyak orang tua yang enggan atau tidak ingin memasukkan anak mereka yang memiliki kebutuhan khusus ke sekolah reguler karena masih banyak orang tua yang

khawatir anaknya akan mendapat penolakan atau diskriminasi. Terlebih lagi, masih banyak masyarakat yang cenderung menunjukkan sikap kurang peduli dengan keberadaan anak dengan kebutuhan khusus dan sekolah inklusi. Dengan ini, anak berkebutuhan khusus akan kesulitan untuk melakukan perkembangan karena lingkungan masyarakat sekitar ABK yang belum memberikan dukungan sepenuhnya.

2) Materi Ajar Dalam Pendidikan Inklusif

Kurikulum pendidikan inklusif sendiri menggunakan kurikulum pendidikan nasional secara umum namun melakukan beberapa penyesuaian. Material atau bahan pengajaran diadaptasi melalui kebutuhan ABK. Bagi anak yang memiliki kemampuan diatas rata-rata mendapatkan materi yang ditambahkan dengan memberikan materi yang lebih dalam tingkatannya. Kemudian, begitu pun sebaliknya bagi anak yang memiliki keterbatasan lainnya dapat dikurangi sesuai kemampuan anak atau diturunkan tingkat kesulitannya pada bagian tertentu. Materi yang perlu dimuat dalam pendidikan inklusif antara lain pembelajaran kemampuan mengikuti instruksi, pembelajaran berbahasa, aktivitas yang mencakup pengembangan sensomotorik, kemampuan akademik, cara bersosialisasi, pemahaman diri serta kontrol diri. Meskipun bahan ajar sudah dirancang sedemikian rupa, terkadang para guru lupa akan beberapa aspek pada kurikulum pendidikan inklusif mengingat pernyataan sebelumnya bahwa pengajar berlatar belakang Pendidikan Luar Biasa di sekolah inklusi yang jumlahnya masih terlampau kurang. Selain itu, sekolah dasar inklusi yang masih dalam tahap perkembangan belum memiliki fasilitas yang mendukung kegiatan belajar mengajar. Tidak adanya penyediaan dinding menggambar, alat dan bahan untuk membuat crafting, radio untuk melaksanakan senam pagi, dan/atau fasilitas sederhana lain yang biasa dimiliki oleh sekolah dasar pada umumnya, cenderung akan sulit membentuk kreativitas karena tidak adanya wadah penguangan potensi diri.

3) Strategi Pembelajaran

Indikator strategi pembelajaran memaparkan ulasan terkait cara tenaga pendidik dalam menyampaikan bahan ajar kepada muridnya. Strategi pembelajaran dalam SD Inklusi ini membahas pula cara guru menerapkan nilai penyeteraan serta merangkul muridnya agar dapat berjalan secara bersamaan

demikian memperoleh tujuan pendidikan inklusi. Faktor keberhasilan strategi pembelajaran, ditekankan kepada kualitas dan pengetahuan dari gurunya karena guru terlibat langsung dengan anak. Guru harus dapat membekali diri dengan pengetahuan yang dimilikinya mengenai karakteristik setiap anak tersebut agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif. Anak yang memiliki keterbatasan fisik maupun mental diperlakukan secara khusus dalam pembelajaran sesuai dengan kondisinya sehingga anak yang normal maupun anak yang memiliki keterbatasan sama-sama dapat mencapai tujuan pembelajaran yang setara. Tantangan yang akan dihadapi ABK dalam menjalani pendidikan inklusi terkait strategi pengajaran guru dapat berupa:

1. Kurangnya komunikasi secara dua arah antara murid dan guru sehingga menciptakan kelas yang pasif, kurang asyik, bahkan jarang mencakup nilai keanekaragaman pada kegiatan belajar mengajar dikhawatirkan dapat membentuk karakter ABK yang sulit untuk bersosialisasi.
2. Metode pengajaran yang kurang bervariasi dan kurang memaksimalkan fasilitas dapat berpotensi membuat ABK stuck hanya pada kemampuan tertentu.
3. Kurangnya perhatian guru akan segala hambatan di lingkungan sekitar KBM dapat mengganggu konsentrasi ABK pada saat belajar.

KESIMPULAN

Sekolah dasar formal sudah menyediakan pendidikan inklusi untuk anak berkebutuhan khusus (ABK). Akan tetapi, apabila dilihat dari tingkat kesiapannya masih belum maksimal karena masih kurangnya tenaga pendidik yang memadai terkait latar belakang pendidikannya sehingga dalam pembimbingan kepada anak berkebutuhan khusus masih adanya hambatan-hambatan. Belum adanya guru pendamping yang latar belakangnya sesuai Program studi Pendidikan luar biasa, jadinya guru di sekolah tersebut yang tidak sesuai kualifikasinya harus mengikuti pelatihan lagi mengenai pendampingan bagi siswa anak berkebutuhan khusus (ABK) tersebut. Selain itu, sarana dan fasilitas yang disediakan di sekolah umum belum cukup lengkap untuk mencakup seluruh kriteria dari anak berkebutuhan khusus (ABK) tersebut. Faktor keberhasilan pembelajaran juga ditentukan oleh bahan ajar dan strategi pembelajarannya. Kesadaran orangtua dan masyarakat (lingkungan sosialnya) juga merupakan suatu hal yang penting untuk mendukung keberlangsungan pembelajaran sebab anak berkebutuhan khusus

memerlukan dukunga besar dari orangtua dalam pengambilan keputusan. Penerimaan dari masyarakat (lingkungan sosialnya) juga berpengaruh terhadap mental anak. Sekolah yang menerapkan pendidikan inklusif memiliki tanggung jawab besar. Pendidikan inklusif bukan hanya menampung siswa berkebutuhan khusus di sekolah reguler dan membiarkannya begitu saja dengan siswa pada umumnya. Pembimbing harus memahami secara mendalam walau hanya salah satu dari kriterik khusus anak inklusi. Pendidikan inklusif juga bukan hanya mengikutsertakan mereka kedalam pembelajaran dengan kriteria khusus yang berbeda saja. Akan tetapi, juga membentuk karakter layaknya siswa pada umumnya. Misalnya, diberi tahu dikit demi sedikit tentang kehidupan bermasyarakat supaya dapat bersosialisasi yang semestinya. Selain itu, menumbuhkan rasa percaya diri mereka akan kemampuan yang dimilikinya. Pelaksanaan pembelajaran siswa inklusif di sekolah dasar formal tetap sama dengan siswa lain pada umumnya, tidak ada perbedaan kedudukan, hanya saja yang membedakannya ialah pelayanannya. Pada proses pembelajaran yang diberikan guru pada anak berkebutuhan khusus (ABK) lebih disesuaikan temponya dibanding siswa pada umumnya. Penanganan pembelajaran untuk siswa inklusif lebih slow learner dan tidak dipaksakan karena siswa tersebut memiliki nilai khusus dibandingkan siswa lainnya. Misal, saat siswa lain mengerjakan soal untuk menghitung luas bangun datar, siswa yang termasuk kedalam kategori slow learner tersebut hanya disuruh menggambarkan dan menuliskan jenis bangun datarnya.

SARAN

Melihat fakta yang terjadi, pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) masih perlu perhatian dan pelayanan lebih, seperti perlu adanya dukungan emosional, kepedulian, kepekaan dan tanggung jawab bukan hanya dari orang tua semata saja, tetapi masyarakat dan pemerintah harus ikut turut serta memberikan afeksi tersebut supaya menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman bagi mereka. Pemerintah harus lebih aware terhadap pendidikan inklusi yang disediakan untuk anak berkebutuhan khusus ini. Misal, dapat mengusahakan untuk membangun sekolah khusus bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) karena tidak semua orang tua dapat mampu secara finansial untuk menyekolahkan anaknya di sekolah khusus, sedangkan yang kurang mampu tersebut hanya dapat menyekolahkan anaknya di sekolah formal, tetapi pelayanan dan fasilitasnya masih kurang memadai. Selain itu, lebih menyediakan guru pembimbing khusus yang memiliki kemampuan dan berlatar belakang pengetahuan di bidangnya tentang penanganan anak berkebutuhan

khusus (ABK) di sekolah dasar sebab guru biasa yang ada di sekolah formal masih kurang paham menangani dan mengatasi kesulitan dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus (ABK) tersebut karena mereka harus mendapat penanganan dan bimbingan khusus dibandingkan siswa pada umumnya serta lebih memperhatikan media-media pembelajaran untuk mereka yang dapat menunjang berjalan lancarnya proses pembelajaran serta memudahkan guru.

DAFTAR REFERENSI

- Alfaaroqi, K. U., & Khoiruddin, M. A. (2020). IMPLEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSIF DAN KENDALANYA DI SDN BETET 1 KOTA KEDIRI. *Insight: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 22(1),1-16.
- Fajra, M., Jalinus, N., Jama, J., & Dakhi, O. (2020). Pengembangan Model Kurikulum Sekolah Inklusi Berdasarkan Kebutuhan Perseorangan Anak Didik. *Jurnal Pendidikan*, 21(1), 51-63.
- Hartadi, D. R., Dewantoro, D. A., & Junaidi, A. R. (2020). Kesiapan Sekolah dalam Melaksanakan Pendidikan Inklusif untuk Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar. *Jurnal Ortopedagogia*, 5 (2), 90-95.
- Hastina, N., & Harahap, D. (2018). Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Di Sdn Medan Marelan. Genta Mulia: *Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 9(1).
- Holifurrahman, H. (2020). Kurikulum Modifikasi Dalam Praktik Pendidikan Inklusif Di SD Al-Firdaus. INKLUSI *Journal Of Disability Studies*, 7(2),271-292.
- Irwanto, P. (2012). *Implementasi Pendidikan Inklusif Di Sekolah Dasar X, Y, Dan Z Kota Jayapura* (Doctoral Dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia).
- Iskandar, R., Satriyani, F. Y., & Munajah, R. (2018). Pendidikan Inklusi Di Sekolah Dasar Negeri Lebak Bulus 06 Pagi DKI Jakarta. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ilmu Keguruan Dan Pendidikan (JPMIKP)*, 1(01).
- Jaenam, J., & Kharles, K. (2021). Pendidikan Inklusi Di Kota Payakumbuh. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(1), 514-519.
- Junaedi, E. (2019). Efektivitas Kebijakan Pendidikan Inklusif Di Tingkat Sekolah Dasar. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 26(2), 238-250.
- Khoiri, K. A. (2021). Pendidikan Inklusi Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Dasar. JIPD (Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar), 5(1), 1-5.
- Marti, A. D. (2012). Pendidikan Inklusif Di Sekolah Dasar Kota Padang. *Jurnal Penelitian Pendidikan Khusus*, 1(3).